RENCANA KERJA TAHUN 2023

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA
Jl. Bandara Juanda No. 100, Sidoarjo 51253 Telp. (031) 8662173 Fax. (031) 8673687

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA

NOMOR : SK.201 / BPPHLHK/ TU/ 12/ 2022

Tentang

PENETAPAN RENCANA KERJA (RENJA)
BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Eselon I selaku penanggung jawaB Program dan Eselon II serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) selaku penanggung jawab kegiatan untuk menyusun Rencana Kerja yang berpedoman pada Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara tentang Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 s/d 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanann Republik Indonesai Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH JAWA BALI NUSA TENGGARA TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2023, dengan ketentuan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Sidoarjo
Pada tanggal : Desember 2022

Kepala Balai,

Taqiuddin, S.Hut., M.P
NIP. 19740628 199903 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK, Jakarta;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK, Jakarta;
3. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian LHK, Jakarta.

KATA PENGANTAR

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK (BPPHLHK) Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara berkomitmen untuk mewujudkan intitusi yang akuntabel, efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan menyusun dokumen Rencana Kerja BPPHLHK Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara untuk tahun 2023.

Dokumen ini merupakan pedoman dan arahan umum dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di BPPHLHK untuk tahun anggaran 2023. Dokumen ini berisikan informasi mengenai target kinerja berupa keluaran (output) dan atau dampak yang ingin diwujudkan oleh BPPHLHK dalam satu tahun anggaran. Selain itu dokumen rencana Kerja Tahun 2023 ini disusun untuk mendukung program kerja Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada khususnya serta mendukung pencapaian kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada umumnya.

Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung hingga terselesaikannya Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara. Akhir kata semoga Rencana Kerja Tahun 2023 dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Sidoarjo, Desember 2022

Kepala Balai

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR GAMBAR iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I 5
PENDAHULUAN 5
A. Latar Belakang 5
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 6
C. Struktur Organisasi 7
D. Sumber Daya Manusia 8
E. Sarana dan Prasarana 13
F. Pengarasutamaan Gender 14
BAB II 16
CAPAIAN KINERJA DAN PROGNOSIS 16
A. Capaian Kinerja s.d Tahun 2022 16
B. Serapan Anggaran Tahun 2022 20
C. Prognosis Capaian Kinerja Tahun 2022 23
BAB III 24
RENCANA KERJA TAHUN 2023 24
A. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 24
B. Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun 2023 25
C. Rencana Anggaran Tahun 2023 27
BAB IV 29
PENUTUP 29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara 3
Gambar 2 Jumlah Pegawai BPPHLHK Jabalnusra 4
Gambar 3 Komposisi ASN Berdasarkan Pangkat dan Jabatan 5
Gambar 4 Sarana dan Prasarana Responsif Gender di lingkup BPPHLHK Jabalnusra 11
Gambar 5 Perbandingan Target, Realisasi dan Prosentase Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022 15
Gambar 6 Prioritas Nasional Tahun 2023 20
Gambar 7 Arah Kebijakan (Renja Setdit, 2023) 21

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Pegawai BPPHLK Jabalnusra 4
Tabel 2 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Jabatan dan Pangkat/Golongan/Ruang Sampai Akhir Tahun 2022 5
Tabel 3 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Jabatan dan Pangkat/Golongan/Ruang Pada Sub Bagian Tata Usaha BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Sampai Akhir Tahun 2022 6
Tabel 4 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Jabatan dan Pangkat/Golongan/Ruang Pada Seksi Wilayah I Jakarta BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara s/d Akhir Tahun 2022 7
Tabel 5. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Jabatan dan Pangkat/Golongan/Ruang Pada Seksi Wilayah II Surabaya BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara s/d Akhir Tahun 2022 8
Tabel 6 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Jabatan dan Pangkat/Golongan/Ruang Pada Seksi Wilayah III Kupang BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara s/d Akhir Tahun 2022 9
Tabel 7 Sarana dan Prasarana BPPHLHK Wilayah Jabalnusra 9
Tabel 8 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2022 13
Tabel 9 Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2022 13
Tabel 10 Perbandingan Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2022 dengan Tahun 2021 16
Tabel 11 Rekapitulasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPPHLHK Wilayah JABALNUSRA Tahun 2022 17
Tabel 12 Anggaran dan Realisasi DIPA BPPHLHK Wilayah Jabalnusra Tahun 2022 18
Tabel 13 Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Sampai dengan Akhir Desember 2022 18
Tabel 14 Prognosis Capaian Kinerha sampai dengan Akhir Desember 2022 19
Tabel 15 Proyek Prioritas Nasional BPPHLK Wilayah Jabalnusra Tahun 2023 22
Tabel 16 Proyek Non-Prioritas Nasional BPPHLK Wilayah Jabalnusra Tahun 2023 23
Tabel 17 Rencana Anggaran Tahun 2023 BPPHLHK Wilayah Jabalnusra 23
Tabel 18 Rencana Anggaran Tahun 2023 BPPHLHK Wilayah Jabalnusra 24

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara perlu disusun rencana kerja tahunan dengan tujuan agar dalam pelaksanaan kegiatan BPPHLHK Jawa Bali dan Nusa Tenggara selama tahun angggaran berjalan dapat terlaksana dengan efektif, efisien, akuntabel serta sejalan dengan target dan prioritas nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undangm dan peraturan yang berlaku.

Rencana Kerja (RENJA) Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam penyusunan dokumen RENJA ini juga mengacu pada Rencana Kerja Strategis Balai PPHLHK Jabalnusa yang telah disusun tahun 2020-2024, Rencana strategis Ditjen PHLHK tahun 2020-2024 serta Rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024.

Selain berpedoman pada dokumen perencanaan yang telah disebutkan di atas, Rencana Kerja tahun 2023 juga mengacu pada hasil evaluasi serta capaian kegiatan BPPHLHK Jabalnusra pada tahun 2022. Dari hasil capaian kinerja BPPHLHK Jabalnusra pada tahun 2022 terdapat beberapa target yang mengalami penurunan kinerjanya apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya penghematan anggaran sehigga berkorelasi pada pencapaian target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hal tersebut, rencana kerja BPPHLK Jabalnusra tahun 2023 ini disusun untuk memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, kebijakan, program dan juga kegiatan yang menjadi prioritas dari BPPHLHK Jabalnusra selama tahun anggaran 2023 dalam rangka membantu pencapaian sasaran proritas

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Proyek Prioritas Nasional di dalam Rencana Kerja Pemerintah Republik Indonesia.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. BPPHLK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara menyelenggarakan pengamanan dan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara menyelenggarakan fungsi antara lain sebagai berikut :

a. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi potensi gangguan lingkungan hidup dan kehutanan;
b. Pelaksanaan invtarisasi dan identifikasi potensi ancaman dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
c. Sosialisasi penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
d. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkaitr lainnya;
e. Pengumpulan data dan informasi pencegahan dan pengamanan hutan;
f. Pelaksanaan kegiatan pencegahan dan operasi pengamanan hutan;
g. Pemberian dukungan dan pelaksanaan operasi penindakan perusakan lingkungan hidup;
h. Pengumpulan bahan dan keterangan, serta penyidikan terhadap pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan;
i. Fasilitasi dan pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;

j. Pengawasan penaatan terhadap pemegang perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah, dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
k. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; dan
l. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi BPPHLHK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah sebagai berikut :

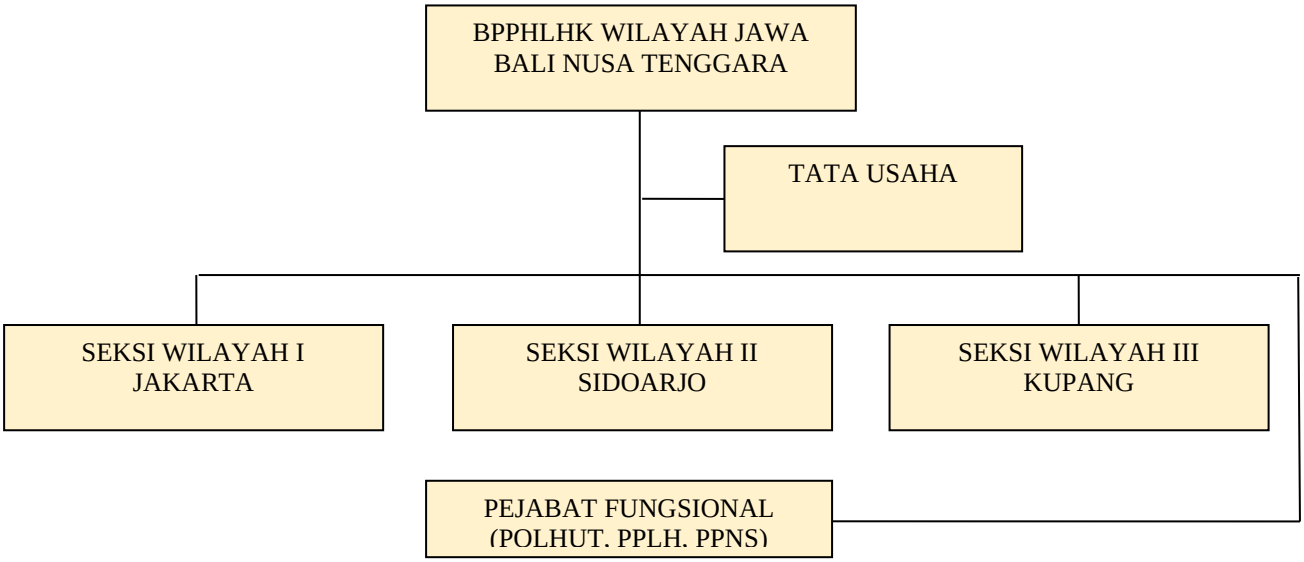

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara

Berdasarkan Peraturan tersebut bahwa Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum berada di Surabaya, Seksi Wilayah I Jakarta, Seksi Wilayah II Surabaya, dan Seksi Wilayah III Kupang.

D.Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Balai Gakkum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara didukung oleh sumber daya manusia. Jumlah pegawai BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara periode sampai akhir Desember 2022 sebanyak 219 orang terdiri dari 191 orang dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN), dan sebanyak 28 orang dengan status tenaga upah (gambar 2).

Tabel 1 Jumlah Pegawai BPPHLK Jabalnusra

Jumlah Pegawai	
ASN	191
Tenaga Upah	28
Total	219

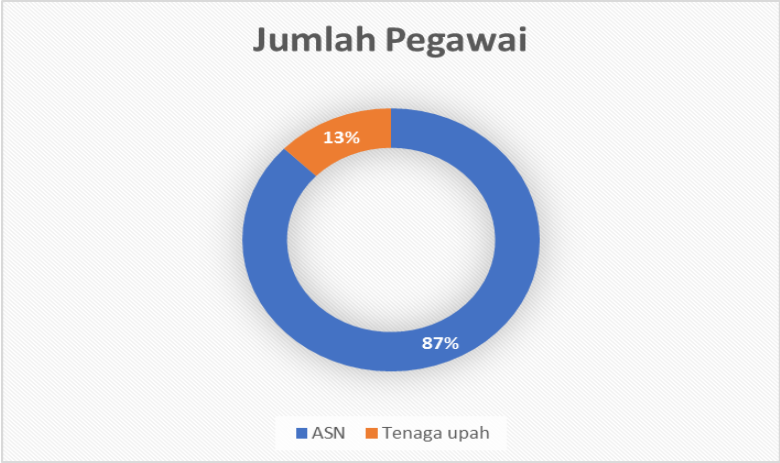

Gambar 2 Jumlah Pegawai BPPHLHK Jabalnusra

Dilihat dari golongan, sebanyak 14 orang dengan golongan IV, sebanyak 146 orang golongan III, dan golongan II sebanyak 31 orang. Penyebaran pegawai sebanyak 63 orang berkantor di Jakarta, DKI Jakarta, sebanyak 98 orang berkantor di Surabaya, Jawa Timur, dan sebanyak 58 orang berkantor di Kupang, NTT. Latar belakang pendidikan pegawai terdiri dari lulusan S2 sebanyak 19 (Sembilan belas) orang, S1 sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) orang, DIII sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, dan SLTA sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang, yang terinci menurut jenis kelamin Laki-laki sebanyak 185 (seratus delapan puluh lima) orang dan Perempuan 34 (tiga puluh empat) orang.

Tabel 2 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Jabatan dan Pangkat/Golongan/Ruang Sampai Akhir Tahun 2022

NO	JABATAN	GOLONGAN IV						GOLONGAN III					GOLONGAN II					TOTAL
		e	d	c	b	a	jml	d	c	b	a	jml	d	c	b	a	jml	
1	ESELON III	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	ESELON IV	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3
3	NON STRUKTURAL	0	0	0	0	2	2	5	2	7	3	17	1	4	0	0	5	24
4	FUNGSIONAL																	
	a. POLHUT	0	0	0	1	4	5	9	40	24	16	89	6	10	0	8	24	118
	c. PPLH	0	0	0	1	3	4	6	10	1	21	38	0	0	0	0	0	42
	d. Pengelola PBJ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	2	3
	e. Komputer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	2
	JUMLAH	**0**	**0**	**0**	**3**	**11**	**14**	**21**	**52**	**32**	**41**	**146**	**9**	**16**	**0**	**8**	**33**	**193**

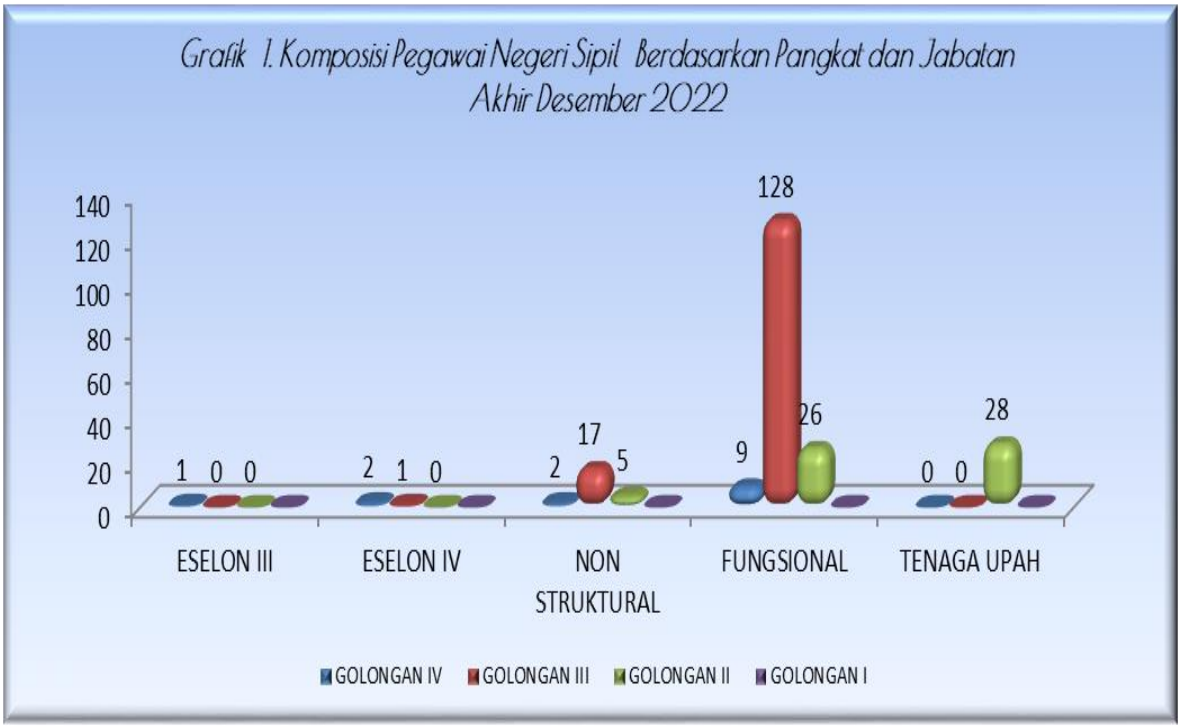

Gambar 3 Komposisi ASN Berdasarkan Pangkat dan Jabatan

Pegawai yang berkedudukan di Sub Bagian Tata Usaha Kantor BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara sebanyak 32 orang, dengan perincian sebagaimana disajikan dalam Tabel 3 di bawah ini :

Tabel 3 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Jabatan dan Pangkat/Golongan/Ruang Pada Sub Bagian Tata Usaha BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Sampai Akhir Tahun 2022

NO	JABATAN	GOLONGAN IV						GOLONGAN III					GOLONGAN II					TOTAL
		e	d	c	b	a	jml	d	c	b	a	jml	d	c	b	a	jml	
1	ESELON III				1		1					0					0	1
2	ESELON IV					1	1					0					0	1
3	NON STRUKTURAL					1	1	5	1	6	2	14		3			3	18
4	FUNGSIONAL						0					0					0	0
	a. POLHUT						0					0					0	0
	b. PPLH						0					0					0	0
	d. Pengelola PBJ										1	1						1
	e. Komputer						0					0	1	1			2	2
5	Tenaga Kontrak																	9
	JUMLAH	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**3**	**5**	**1**	**6**	**3**	**15**	**1**	**4**	**0**	**0**	**5**	32

Pegawai yang berkedudukan di Seksi Wilayah I Jakarta sampai akhir Desember 2022 sebanyak 63 orang pegawai, dengan perincian sebagaimana disajikan dalam Tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Jabatan dan Pangkat/Golongan/Ruang Pada Seksi Wilayah I Jakarta BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara s/d Akhir Tahun 2022

NO	JABATAN	GOLONGAN IV						GOLONGAN III					GOLONGAN II					TOTAL
		e	d	c	b	a	jml	d	c	b	a	jml	d	c	b	a	jml	
1	ESELON III						0					0					0	0
2	ESELON IV					1	1					0					0	1
3	NON STRUKTURAL	0					0					0					0	0
4	FUNGSIONAL						0					0					0	0
	a. POLHUT					2	2	2	15	12	6	35		3		3	6	43
	b. PPLH					1	1		2		11	13					0	14
	d. Pengelola PBJ						0					0					0	0
	e. Komputer																	0
5	Tenaga Kontrak																	5
	JUMLAH	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**4**	**2**	**17**	**12**	**17**	**48**	**0**	**3**	**0**	**3**	**6**	63

Pegawai yang ditempatkan di Seksi Wilayah II Surabaya sebanyak 66 orang, namun terbagi dalam 3 lokasi yaitu di Yogyakarta sebanyak 13 pegawai, selanjutnya di Kota Semarang sebanyak 5 pegawai, dan sebanyak 48 orang di Surabaya dengan perincian sebagaimana disajikan dalam Tabel 5 di bawah ini :

Tabel 5. Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Jabatan dan Pangkat/Golongan/Ruang Pada Seksi Wilayah II Surabaya BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara s/d Akhir Tahun 2022.

NO	JABATAN	GOLONGAN IV						GOLONGAN III					GOLONGAN II					TOTAL
		e	d	c	b	a	jml	d	c	b	a	jml	d	c	b	a	jml	
1	ESELON III						0					0					0	0
2	ESELON IV						0					0					0	0
3	NON STRUKTURAL					1	1		1	1	1	3	1	1			2	6
4	FUNGSIONAL						0					0					0	0
	a. POLHUT						0	4	12	3	7	26	4	3		3	10	36
	b. PPLH				1	2	3	5	8	1	5	19					0	22
	d. Pengelola PBJ											0					0	0
	e. Komputer																	0
5	Tenaga Kontrak																	2
	JUMLAH	**0**	**0**	**0**	**1**	**3**	**4**	**9**	**21**	**5**	**13**	**48**	**5**	**4**	**0**	**3**	**12**	66

Pegawai yang ditempatkan di Seksi Wilayah III Kupang sebanyak 58 orang, dengan kedudukan di Kota Mataram sebanyak 14 orang, sebanyak 17 orang di Kota Labuan Bajo, sebanyak 8 orang berkedudukan di Denpasar dan sebanyak 19 orang di Kota Kupang, dengan perincian sebagaimana disajikan dalam Tabel 6 di bawah ini :

Tabel 6 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Jabatan dan Pangkat/Golongan/Ruang Pada Seksi Wilayah III Kupang BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara s/d Akhir Tahun 2022

NO	JABATAN	GOLONGAN IV						GOLONGAN III					GOLONGAN II					TOTAL
		e	d	c	b	a	jml	d	c	b	a	jml	d	c	b	a	jml	
1	ESELON III						0					0					0	0
2	ESELON IV						0	1				1					0	1
3	NON STRUKTURAL						0					0					0	0
4	FUNGSIONAL						0					0					0	0
	a. POLHUT				1	2	3	3	13	9	3	28	2	4		2	8	39
	b. PPLH						0	1		0	5	6					0	6
	d. Pengelola PBJ						0					0					0	0
	e. Komputer																	0
5	Tenaga Kontrak																	12
	JUMLAH	**0**	**0**	**0**	**1**	**2**	**3**	**5**	**13**	**9**	**8**	**35**	**2**	**4**	**0**	**2**	**8**	58

E. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung kinerja BPPHLHK Wilayah Jabalnusra dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Pada akhir tahun 2022, jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPPHLHK Wilayah Jabalnusra tersaji dalam tabel 7 berikut:

Tabel 7 Sarana dan Prasarana BPPHLHK Wilayah Jabalnusra

No	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Mobil Patroli/Intelejen	22 unit
2	Mobil Pengawas	2 unit
3	Mobil Tahanan	1 unit
4	Motor Patroli	17 unit
5	Drone	8 unit
6	GPS	31 unit
7	Laptop	140 unit
8	Senjata Api	223 pucuk

Pada akhir tahun 2022, total nilai Barang Milik Negara (BMN) pada BPPLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara sampai akhir Desember 2021 adalah sebesar Rp. 51.930.328.082,- terdiri dari Tanah Bangunan Kantor sebesar Rp. 10.631.025.500,

peralatan dan mesin sebesar Rp. 33.927.680.479,- Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 7.036.773.913,- Irigasi sebesar Rp. 110.102.000,- , Jaringan sebesar Rp. 44.848.000,- dan Aset Tetap yang Tidak Digunakan sebesar Rp. 179.898.190,-.

F. Pengarasutamaan Gender

Pengarasutamaan gender bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.

BPPHLHK Wilayah Jabalnusra berkomitmen untuk melaksanakan PUG yang diimplementasikan melalui beberapa bentuk. Bentuk komitmen tersebut diwujudkan dalam beberapa bentuk, diantaranya yaitu:

- Pemuatan mengenai PUG di Rencana Strategis BPPHLHK Wilayah Jabalnusra tahun 2020-2024
- Penyediaan anggaran responsive gender di RKA-KL tahun 2022
- Pembentukan Sub Pokja PUG lingkup BPPHLHK Jabalnusra
- Penunjukan Focal Point, Gender Champion PUG lingkup BPPHLHK Jabalnusra
- Edaran mengenai penguatan implementasi PUG lingkup BPPHLHK Jabalnusra
- Penyusunan Rencana Aksi PUG
- Perbaikan sarana dan prasana yang responsive gender

Gambar 4 Sarana dan Prasarana Responsif Gender di lingkup BPPHLHK Jabalnusra

BAB II

CAPAIAN KINERJA DAN PROGNOSIS

A. Capaian Kinerja s.d Tahun 2022

Sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran selama satu tahun, setiap instansi pemerintah wajib menyusun laporan hasil capaian kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor : 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun salah satu alat yang digunakan untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah Laporan Kinerja (LKj), yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK melaksanakan upaya-upaya preemtif, preventif, represif dan yustisi yang mendukung rencana strategis penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2015-2019. Sasaran strategis 2015-2019 mengakselerasi capaian sasaran strategis Program Penegakan Hukum LHK pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara melalui 4 kegiatan, yaitu:

1. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
2. Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan.
3. Kegiatan Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi.
4. Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara pada tahun 2022 serta target , antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 8 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET CAPAIAN IKK TAHUN 2022
1.	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pene-gakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan
2.	Terlaksananya Pencegahan dan Pengaman Hutan terhadap gang-guan dan ancaman hutan di 34 Provinsi	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	4 Operasi
		Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	6 Operasi
		Peningkatan Kapasitas Polisis Kehutanan	40 Orang
3.	Meningkatnya efektivitas Penanganan Pengaduan, Pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH dan PUU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	98 Perusahaan
		PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang
4.	Meningkatnya efektivitas Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P.21	24 Kasus
		Kapasitas PPNS LHK yang ditingkatkan	4 Orang

Dari sasaran kegiatan dan indicator pada table di atas, pada akhir tahun 2022 capaian kinerja untuk masing-masing indicator dan target tersaji pada tabel berikut:

Tabel 9 Capaian Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	IKK TAHUN 2022	
			TARGET	REALISASI
1.	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	1 Layanan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	IKK TAHUN 2022	
			TARGET	REALISASI
	Jenderal Pene-gakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
2.	Terlaksananya Pencegahan dan Pengaman Hutan terhadap gang-guan dan anc-aman hutan di 34 Provinsi	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	4 Operasi	7 Operasi
		Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	6 Operasi	9 Operasi
		Peningkatan Kapasitas Polisis Kehutanan	40 Orang	119 Orang
3.	Meningkatnya efektivitas Penanganan Pengaduan, Pengawasan izin lingkungan dan izin PPLH dan PUU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	98 Perusahaan	101 Perusahaan
		PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang	27 Orang
4.	Meningkatnya efektivitas Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P.21	24 Kasus	27 Kasus
		Kapasitas PPNS LHK yang ditingkatkan	4 Orang	10 Orang

Berdasarkan tabel di atas apabila dilihat capaian kinerja dari 9 (sembilan) indikator kinerja tahun 2022 yaitu:

1. Layanan Perkantoran, yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan, operasional dan pemeliharaan kantor dapat dilaksanakan selama 12 bulan atau 100 %.
2. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, yang meliputi penyusunan rencana program anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan kepegawaian, dapat dilaksanakan selama 12 bulan atau 100 %.
3. Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan terealisasi sebanyak 7 operasi dari target sebanyak 4 operasi atau 175%.
4. Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal terealisasi sebanyak 9 Operasi dari target sebanyak 6 Operasi atau 150%.

5. Kapasitas Polisi Kehutanan yang ditingkatkan terealisasi sebanyak 119 orang dari target sebanyak 40 orang atau sebesar 297,5%
6. Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK sebanyak 101 izin dari target sebanyak 98 izin atau 103,06%, dengan rincian sebanyak 58 izin dari pengawasan, dan sebanyak 43 izin dari pengaduan perusahaan.
7. Kapasitas PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya terealisasi sebanyak 27 orang dari target sebanyak 5 orang atau sebesar 540%.
8. Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P.21 terealisasi 27 kasus dari target sebanyak 24 kasus atau 112,50%.
9. Kapasitas PPNS LHK yang ditingkatkan terealisasi sebanyak 10 orang dari target sebanyak 4 orang atau 250%.

Adapun grafik capaian kinerja tahun 2022 apabila dibandingkan dengan target dapat dilihat pada gambar 3 berikut.

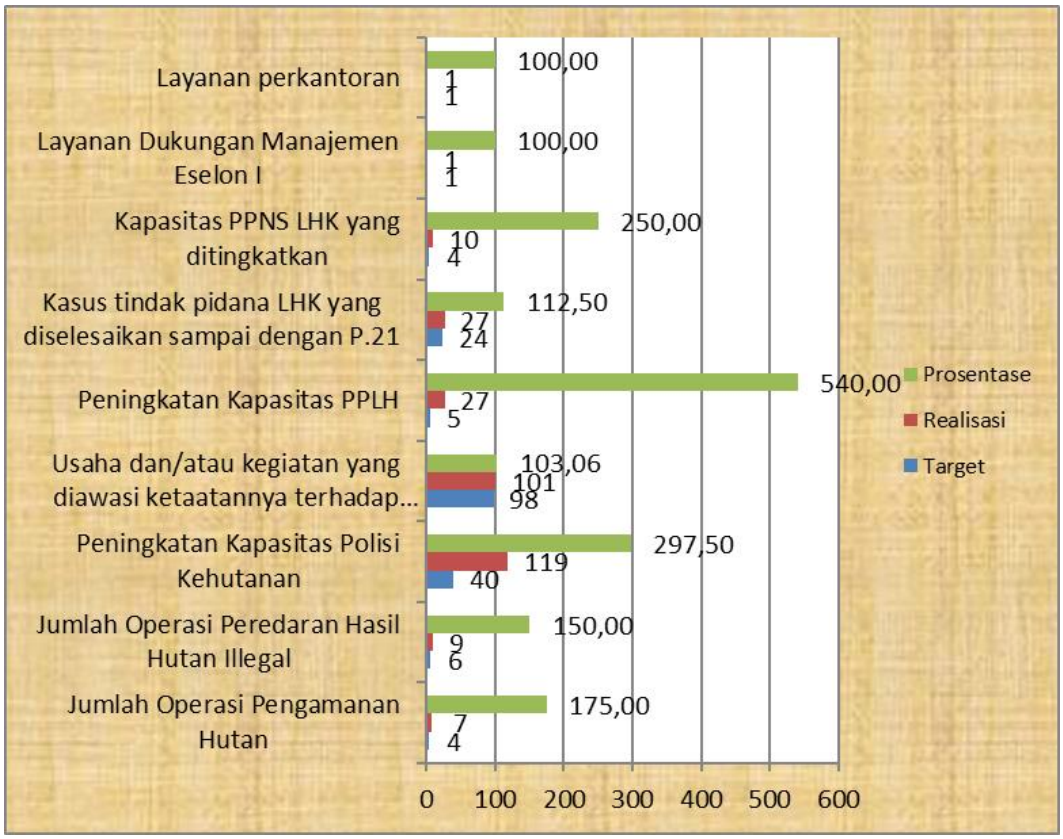

Gambar 5 Perbandingan Target, Realisasi dan Prosentase Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022

Tabel 10 Perbandingan Capaian Kinerja Kegiatan Tahun 2022 dengan Tahun 2021

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	CAPAIAN IKK	
			2021	2022
1.	Terwujudnya Reformasi Tata Kelola Kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pene-gakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	1 Layanan
		Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
2.	Terlaksananya Pencegahan dan Pengaman Hutan terhadap gang-guan dan anc-aman hutan di 34 Provinsi	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	21 Operasi	7 Operasi
		Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal.	16 Operasi	9 Operasi
		Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	113 Orang	119 Orang
3.	Meningkatnya efektivitas Penanganan Pengaduan, Pengawasan izin lingkung-an dan izin PPLH dan PUU, ketaatan terhadap Sanksi Administrasi	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	129 izin	101 izin
		PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	17	27 Orang
4.	Meningkatnya efektivitas Penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P.21	34 Kasus	27 Kasus
		Kapasitas PPNS LHK yang ditingkatkan	4 Orang	10 Orang

B. Serapan Anggaran Tahun 2022

Pada tahun 2022, anggaran BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara sebagaimana yang telah tertuang dalam DIPA tahun 2022 adalah sebesar **Rp. 47.008.774.000,-** (**Empat Puluh Tujuh Milyar Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah**). Namun setelah melalui beberapa kali perubahan/penghematan/penyesuaian, BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara akhirnya mendapat alokasi anggaran dalam DIPA Tahun 2022 yaitu sebesar Rp. **41.185.745.000**,- (**Empat Puluh Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah**), dengan rincian sebagaimana Tabel 10 di bawah ini :

Tabel 11 Rekapitulasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPPHLHK Wilayah JABALNUSRA Tahun 2022

PROGRAM	KEGIATAN	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN (Rp)	
				SEMULA	MENJADI
Kualitas Lingkungan Hidup	Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi (5430)	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kapasitas PPLH	100,000,000	-
		Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	Pengawasan Ketaatan LHK terhadap Badan Usaha	3,145,500,000	1,867,255,000
	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan (5431)	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kapasitas PPNS	20,000,000	-
		Penanganan Perkara	Kasus Tindak Pidana LHK P21	11,490,000,000	8,268,353,000
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Pencegahan dan Pengamanan Hutan (5428)	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	240,000,000	182,321,000
		Operasi Bidang Keamanan	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	2,504,724,000	1,841,212,000
			Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	2,335,276,000	1,336,610,000
Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHLHK (5427)	Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum	1,000,000,000	1,000,000,000
			Layanan Perkantoran	26,173,274,000	26,689,994,000
JUMLAH ANGGARAN				**47,008,774,000**	**41,185,745,000**

Dari pagu anggaran yang telah ditetapkan pada tahun 2022 tersebut, realisasi anggaran sampai dengan 31 Desember 2022 tercapai sebesar Rp. **41.157.228.892**,-

(**Empat Puluh Satu Milyar Seratus Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah**) dengan persentase realisasi sebesar 99,93% dari pagu anggaran. Secara rinci pagu anggaran dan realisasi DIPA Satker BPPHLHK Jawa Bali Nusa Tenggara Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 12 Anggaran dan Realisasi DIPA BPPHLHK Wilayah Jabalnusra Tahun 2022

MAK		IKK	TAHUN 2022		
			Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
5427	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (Layanan Perkantoran)	26,689,994,000	26,685,575,920	99.98
5427	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Satker UPT (Layanan Umum)	1,000,000,000	997,472,437	99.75
5428	QHB	Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	1,841,212,000	1,841,036,605	99.99
5428	QHB	Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal	1,336,610,000	1,336,241,361	99.97
5428	DCE	Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	182,321,000	182,274,382	99.97
5430	DCE	Peningkatan Kapasitas PPLH	-	-	0.00
5430	QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga/Badan Usaha	1,867,255,000	1,854,481,983	99.32
5431	DCE	Peningkatan Kapasitas PPNS	-	-	0.00
5431	QCE	Kasus Tindak Pidana P.21	8,268,353,000	8,260,146,204	99.90
JUMLAH			**41,185,745,000**	**41,157,228,892**	**99.93**

Apabila digolongkan menurut jenis belanja, maka realisasi untuk masing masing jenis belanja sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 13 Realisasi Anggaran Menurut Jenis Belanja Sampai dengan Akhir Desember 2022

No.	Kode	Nama Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1	51	BELANJA PEGAWAI	21,423,771,000	21,423,743,636	100.00
2	52	BELANJA BARANG	14,547,532,000	14,519,168,668	99.81
3	53	BELANJA MODAL	5,214,442,000	5,214,316,588	100.00
JUMLAH			41,185,745,000	41,157,228,892	99.93

C. Prognosis Capaian Kinerja Tahun 2022

Prognosis adalah perkiraan capaian target di tahun 2022 yang tercantum pada Rencana Kerja Tahun 2021, saat penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 di akhir tahun 2021, ikut memperhitungkan penanganan kasus luar biasa, pandemic covid-19 serta adanya *Automatic Adjustment*.

Tabel 14 Prognosis Capaian Kinerha sampai dengan Akhir Desember 2022

NO	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	PROGNOSIS	HASIL
		TAHUN 2022		
1.	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 Layanan	1 layanan	1 Layanan
	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 layanan	1 Layanan
2.	Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan	4 Operasi	10 Operasi	7 Operasi
	Jumlah Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal.	6 Operasi	5 Operasi	9 Operasi
	Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan	40 Orang	119 Orang	119 Orang
3.	Usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Bidang LHK	98 Perusahaan	110 perusahaan	101 perusahaan
	PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	5 Orang	15 Orang	27 Orang
4.	Kasus tindak pidana LHK yang diselesaikan sampai dengan P.21	24 Kasus	24 Kasus	27 Kasus
	Kapasitas PPNS LHK yang ditingkatkan	4 Orang	8 Orang	10 Orang

BAB III

RENCANA KERJA TAHUN 2023

A. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023

Rencana Kerja Pemerintah 2023 (RKP 2023) disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berbasis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Bagi Pemerintah Pusat, RKP 2023 digunakan sebagai pedoman bagi K/L pada saat menjabarkan PN ke dalam Rencana Kerja (Renja) K/L 2023 dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L 2023. yang selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang APBN 2023. Dokumen RKP 2023 menjabarkan rencana pembangunan secara lebih rinci ke dalam PN, PP, KP, dan MP dengan menjaga kesinambungan hierarki sasaran dan ketepatan indikator sasaran di setiap tingkatan kinerja untuk memastikan tercapainya sasaran dan target pembangunan serta terlaksananya evaluasi dan pengendalian pencapaian sasaran PN secara efektif.

RKP tahun 2023 merupakan RKP tahun keempat yang termasuk dalam penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan dijabarkan menjadi 7 prioritas nasional (PN).

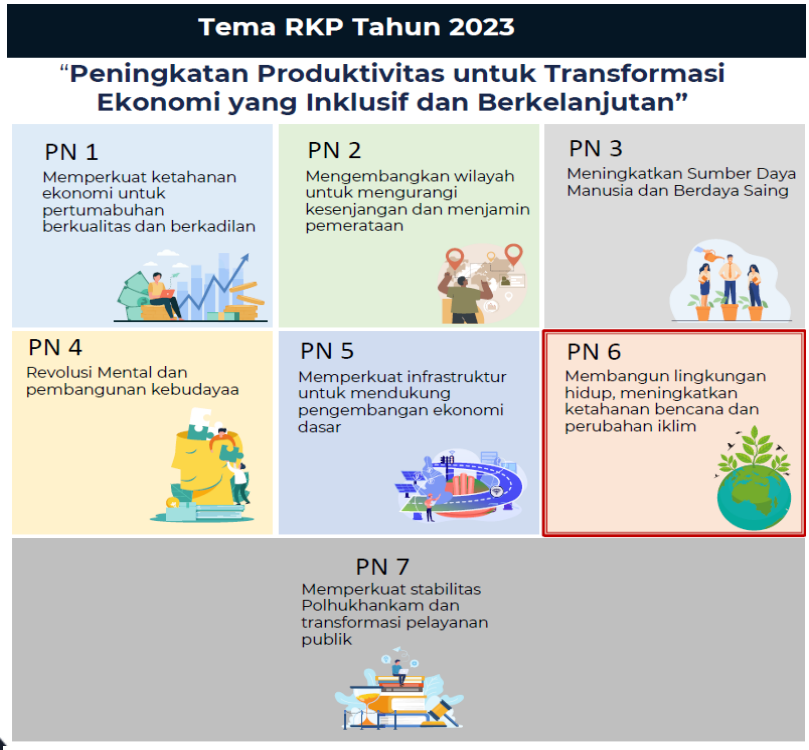

Gambar 6 Prioritas Nasional Tahun 2023

Sinergitas program dan kegiatan KLHK dalam prioritas nasional, diharapkan dapat mendorong pembangunan sektor lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2023, memastikan lingkungan hidup dan kehutanan yang lestari, turut serta dalam percepatan pemulihan pandemi COVID-19. Dalam mendukung Program KLHK dan Program Prioritas Nasional Balai Penanganan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal GAKKUM KLHK Tahun 2023 mengikuti Arahan Prioritas Nasional yang tercantum di dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah di Tahun 2023.

B. Sasaran Kegiatan, Unit Kegiatan dan Elemen Kegiatan Tahun 2023

Dari 7 (tujuh) agenda Prioritas Nasional (PN), Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan dan Kehutanan dan unit yang berada di bawahnya termasuk BPPHLK Wilayah Jabalnusra mendukung PN 6 yaitu membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Dari PN 6 ini kemudian dijabarkan lagi melalui Kegiatan Prioritas (KP 4) pada PP1 yaitu Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bisang SDA dan LH.

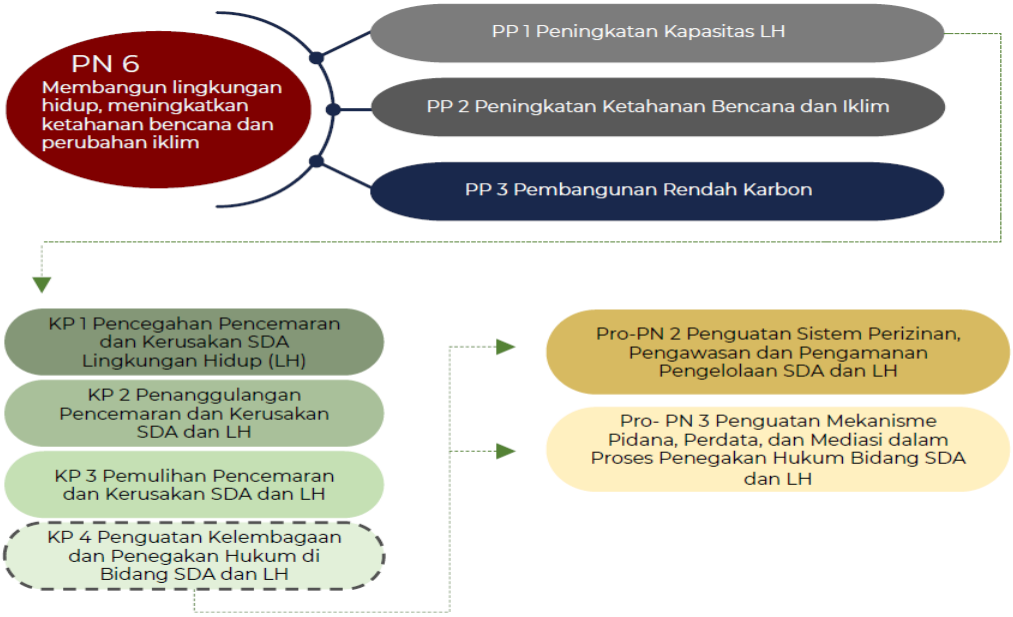

Gambar 7 Arah Kebijakan (Renja Setdit, 2023)

Dari KP 4, BPPHLK Wilayah Jabalnusra berperan pada proyek Prioritas Nasional 2 yaitu Penguatan sistem Perizinan, Pengawasan dan Pengamanan Pengelolaan SDA dan LH serta Proyek Prioritas Nasional 3 Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang SDA dan LH. Rincian Kegiatan, Sasaran Kegiatan, Indikator serta target BPPHLHK untuk tahun 2023 untuk Prioritas Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15 Proyek Prioritas Nasional BPPHLK Wilayah Jabalnusra Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	TARGET 2023	SATUAN
Program: Kualitas Lingkungan Hidup				
Terawasinya usaha dan/atau kegiatan terhadap ketaatan izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan bidang LHK	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap peraturan perundang- undangan bidang LHK	Jumlah PPLH yang ditingkatkan kapasitasnya	10	Orang
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang LHK	124	Badan Usaha
Terselesaikannya Kasus Pidana LHK sampai dengan P21	Meningkatnya kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P21	Jumlah PPNS LHK yang ditingkatkan kapasitasnya	5	Orang
		Jumlah kasus pidana lingkungan hidup dan kehutanan yang diselesaikan sampai dengan P-21	31	Perkara
Program: Pengelolaan Hutan Berkelanjutan				
Terlaksananya operasi pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan	Meningkatnya operasi pengamanan hutan, perusakan lingkungan hidup dan peredaran hasil hutan	Jumlah operasi pengamanan hutan dan penindakan perusakan lingkungan hidup	3	Operasi
		Jumlah operasi pembalakan liar,	4	Operasi

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	TARGET 2023	SATUAN
		tumbuhan dan satwa liar		
		Jumlah POLHUT yang ditingkatkan kapasitasnya	15	Orang

Selain Prioritas Nasional, BPPHLK Jabalnusra juga mempunyai sasaran kegiatan, IKK dan output yang tidak temasuk di dalam Prioritas Nasional sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 16 Proyek Non-Prioritas Nasional BPPHLK Wilayah Jabalnusra Tahun 2023

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	TARGET 2023	SATUAN
Program: Dukungan Manajemen				
Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik	Nilai SAKIP Ditjen Gakkum LHK	Jumlah Layanan Perkantoran	1	Layanan
		Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satuan Kerja	1	Layanan

C. Rencana Anggaran Tahun 2023

Total pagu untuk Tahun Anggaran 2023 pada BPPHLHK Wilayah Jabalnusra adalah sebesar Rp. 47.376.723.000 (empat puluh tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga rupiah), dengan rincian untuk setiap IKK adalah sebagai berikut:

Tabel 17 Rencana Anggaran Tahun 2023 BPPHLHK Wilayah Jabalnusra

Kode Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Pagu (Rp)
5427.EBA	Layanan Umum	950.000.000
5427.EBA	Layanan Perkantoran	28.916.223.000
5428.DCE	Pelatihan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	200.000.000
5428.QHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam	3.505.000.000
5431.QCE	Penanganan Perkara	13.805.500.000
JUMLAH		**47.376.723.000**

Balai PPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara merupakan salah satu UPT Ditjen Penegakan Hukum KLHK yang mendukung 2 Proyek Prioritas Nasional yaitu Penguatan Sstem Perizinan, Pengawasan dan Pengamanan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup serta Penegakan Hukum dibidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup Bidang Kementerian LHK pada RKP tahun 2023. Apabila digolongkan berdasarkan sumber dana dan jenis belanjanya, rincian pagu anggaran BPPHLK Jabalnusra untuk Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut.

Tabel 18 Rencana Anggaran Tahun 2023 BPPHLHK Wilayah Jabalnusra

No	SATKER/URAIAN	SUMBER DANA		TOTAL PAGU
		RM	PNBP	
1	Belanja Pegawai	23,500,000,000	-	23,500,000,000
2	Belanja Operasional	5,416,223,000	-	5,416,223,000
3	Belanja Non Operasional	14,271,500,000	4,189,000,000	18,460,500,000
		43,187,723,000	**4,189,000,000**	**47,376,723,000**

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Tahun 2023 ini tak hanya berisi semangat untuk memperkuat apa yang telah dicapai di tahun 2022, namun demikian didalamnya memuat komitmen meletakkan landasan pencapaian pembangunan tahun 2023. Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Tahun 2023 telah memasukkan Indikator Kinerja yang ditetapkan dan disusun berdasarkan evaluasi, arahan, dan masukan untuk pembangunan satu tahun mendatang, dan titik awal pelaksanaan RPJMN, Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Rencana Strategis Direktorat Jenderal GAKKUM KLHK Tahun 2020-2024 dan Rencana Strategis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Tahun 2020-2024.

Rencana Kerja Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara merupakan panduan pengelola dalam menjalankan pengelolaan dalam setahun ke depan. Rencana pengelolaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Kegiatan-kegiatan yang direncanakan telah disesuaikan dengan kondisi yang ada sehingga secara adaptif dapat diimplementasikan di lapangan.

Rencana Kerja Tahun 2023 ini dapat tercapat apabila kondisi usulan anggaran ini disetujui tanpa ada kendala pencairan dana ataupun pencadangan anggaran *automatic adjustment* dari awal pelaksanaan.

Perlu disadari bahwa Rencana Kerja ini bukanlah merupakan dokumen yang sempurna dan tanpa Kelemahan. Oleh Sebab itu saran dan masukan sangat diperlukan untuk penyempurnan penyusunan Rencana Kerja tahun berikutnya.

LAMPIRAN

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU
029.10.FD	Program Kualitas Lingkungan Hidup			13,805,500,000
5431	Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan			13,805,500,000
5431.QCE	Penanganan Perkara[Base Line]	31	Perkara	13,805,500,000
5431.QCE.001	**Kasus Tindak Pidana LHK P21**	**31**	**Perkara**	**13,805,500,000**
057	**Penyidikan Kasus Tindak Pidana LHK**			**13,805,500,000**
029.10.FF	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan			3,705,000,000
5428	Pencegahan dan Pengamanan Hutan			3,705,000,000
5428.DCE	Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup[Base Line]	15	Orang	200,000,000
5428.DCE.001	**Polisi Kehutanan yang Ditingkatkan Kapasitasnya**	**15**	**Orang**	**200,000,000**
051	**Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan**			**200,000,000**
A	*Peningkatan Kapasitas Polisi Kehutanan*			*200,000,000*
5428.QHD	Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam[Base Line]	7	Operasi	3,505,000,000
5428.QHD.001	**Operasi Pengamanan Kawasan Hutan**	**3**	**Operasi**	**1,655,000,000**
051	**Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan**			**355,000,000**
A	*Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan Seksi Wilayah 1*			*112,000,000*
B	*Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan Seksi Wilayah 2*			*112,000,000*
C	*Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan Seksi Wilayah 3*			*112,000,000*
D	*Koordinasi dan Konsultasi Pengumpulan Data dan Informasi Ancaman dan Gangguan Kawasan Hutan*			*19,000,000*
052	**Operasi Pemulihan Keamanan Kawasan Hutan**			**1,300,000,000**
A	*Operasi Pengamanan Kawasan Hutan Seksi Wilayah 1*			*125,000,000*
B	*Operasi Pengamanan Kawasan Hutan Seksi Wilayah 2*			*125,000,000*
C	*Operasi Pengamanan Kawasan Hutan Seksi Wilayah 3*			*125,000,000*
D	*Operasi Pengamanan Kawasan Hutan DAS Citarum*			*125,000,000*
E	*Operasi Pengamanan Kawasan Hutan Balai*			*100,000,000*
F	*Operasional Kapal Badak Laut*			*400,000,000*
G	*Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Operasi Pengamanan Kawasan Hutan*			*100,000,000*
H	*Pelatihan Menembak dan Kesemaptaan (Seksi Wilayah 1 Jakarta)*			*66,050,000*
I	*Pelatihan Menembak dan Kesemaptaan (Seksi Wilayah 2 Surabaya)*			*66,000,000*
J	*Pelatihan Menembak dan Kesemaptaan (Seksi Wilayah 3 Kupang)*			*67,950,000*
5428.QHD.002	**Operasi Peredaran Hasil Hutan Illegal**	**4**	**Operasi**	**1,850,000,000**
051	**Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasill Hutan Illegal**			**250,000,000**
A	*Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal Seksi Wilayah 1*			*74,000,000*
B	*Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal Seksi Wilayah 2*			*74,000,000*
C	*Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal Seksi Wilayah 3*			*74,000,000*
D	*Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Pengumpulan Data dan Informasi Peredaran Hasil Hutan Illegal*			*28,000,000*
053	**Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan hutan**			**100,000,000**
A	*Sosialisasi dan Kerjasama Pencegahan dan Pengamanan Hutan*			*100,000,000*
054	**Operasi Pembalakan Liar**			**600,000,000**

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU
A	*Operasi Pembalakan Liar Seksi Wilayah 1*			*170,000,000*
B	*Operasi Pembalakan Liar Seksi Wilayah 2*			*170,000,000*
C	*Operasi Pembalakan Liar Seksi Wilayah 3*			*170,000,000*
D	*Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Operasi Pembalakan Liar*			*90,000,000*
055	**Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar**			**400,000,000**
A	*Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar Seksi Wilayah 1*			*120,000,000*
B	*Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar Seksi Wilayah 2*			*120,000,000*
C	*Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar Seksi Wilayah 3*			*120,000,000*
D	*Koordinasi dan Konsultasi Kegiatan Operasi Tumbuhan dan Satwa Liar*			*40,000,000*
056	**Penguatan Sistem Intelijen**			**100,000,000**
A	*Penguatan Sistem Intelijen*			*100,000,000*
057	**Dukungan Teknis Pencegahan dan Pengamanan Hutan**			**400,000,000**
A	*Fasilitasi Pengurusan Administrasi Senjata Api Seksi Wilayah 1*			*77,600,000*
B	*Fasilitasi Pengurusan Administrasi Senjata Api Seksi Wilayah 2*			*79,300,000*
C	*Fasilitasi Pengurusan Administrasi Senjata Api Seksi Wilayah 3*			*65,050,000*
D	*Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi PPH*			*178,050,000*
029.10.WA	Program Dukungan Manajemen			29,866,223,000
5427	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan			29,866,223,000
5427.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	2	Layanan	29,866,223,000
5427.EBA.962	**Layanan Umum**	**1**	**Layanan**	**950,000,000**
062	**Layanan Dukungan Manajemen Satker**			**950,000,000**
A	*Penyusunan Rencana Kerja Anggaran*			*300,000,000*
B	*Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi*			*139,800,000*
C	*Penyelenggaraan SPIP*			*54,200,000*
D	*Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan*			*118,300,000*
E	*Penyusunan Laporan Keuangan*			*31,500,000*
F	*Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Persediaan*			*126,400,000*
G	*Pengelolaan Kepegawaian*			*179,800,000*
5427.EBA.994	**Layanan Perkantoran**	**1**	**Layanan**	**28,916,223,000**
001	**Gaji dan Tunjangan**			**23,500,000,000**
A	*Pembayaran gaji dan tunjangan*			*23,500,000,000*
002	**Operasional dan Pemeliharaan Kantor**			**5,416,223,000**
A	*Keperluan Sehari-hari Perkantoran*			*1,382,870,000*
B	*Langganan Daya dan Jasa*			*579,600,000*
C	*Honor Terkait Operasional Satuan Kerja*			*315,240,000*
D	*Biaya Pemeliharaan Gedung*			*164,550,000*
E	*Pemeliharaan Inventaris Kantor*			*10,664,000*
F	*Sewa Gedung Kantor dan POS Gakkum*			*559,373,000*
G	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Kantor Balai*			*322,100,000*
H	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Seksi Wilayah 1 Jakarta*			*202,000,000*
I	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Seksi Wilayah 2 Surabaya*			*198,000,000*

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/KOMPONEN	TARGET	SATUAN	PAGU
J	*Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Seksi Wilayah 3 Kupang*			*210,000,000*
K	*Operasional Kapal Badak Laut*			*1,149,531,000*
L	*Operasional Kapal Speedboat*			*257,295,000*
M	*Penanganan Covid 19*			*65,000,000*